

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi merupakan suatu usaha untuk meningkatkan produktifitas dari pemanfaatan sumberdaya potensial yang dimiliki oleh suatu wilayah atau suatu negara. Sumberdaya potensial dimaksud adalah sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya finansial. Peningkatan produktifitas mengandung makna bahwa pemanfaatan sumberdaya tersebut secara ekonomis dapat diproduksi dengan hasil yang optimal dari kapasitas sumberdaya yang digunakan. Upaya seperti ini merupakan sebuah proses pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk melakukan perubahan tingkat kesejahteraan masyarakat yang lebih baik dari keadaan sebelumnya.

Kenyataannya proses pembangunan ekonomi tidaklah sederhana, namun pada pelaksanaannya sangat kompleks, karena bersifat multidimensi. Antara lain kompleksitas tersebut adalah pembangunan ekonomi tidak hanya melakukan bagaimana meningkatkan produktifitas melalui proses produksi yang secara klasik ditentukan oleh faktor input seperti modal, tenaga kerja, teknologi, dan bahan baku, tetapi juga menyangkut aspek tempat dimana aktifitas tersebut berlangsung, aspek sosial yang mempengaruhi perilaku masyarakat baik pada proses produksi maupun pada perilaku konsumsi. Untuk tujuan tersebut maka diperlukan perencanaan ekonomi yang bersifat komprehensif dan integratif antara pembangunan ekonomi pada satu sisi dan pembangunan sosial pada sisi yang lain.

Berbagai studi telah dilakukan mengapa perekonomian suatu negara mengalami pertumbuhan, baik pertumbuhan positif maupun pertumbuhan negatif. Teori ekonomi klasik menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh faktor-faktor produksi seperti modal, tenaga kerja, dan teknologi. Jadi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi maka diperlukan peningkatan pemanfaatan faktor-faktor tersebut. Lebih spesifik lagi, dapat diuraikan dalam pertanyaan berapa tingkat pertumbuhan modal, tingkat pertumbuhan kesempatan kerja, serta peningkatan teknologi yang dibutuhkan untuk mencapai tingkat pertumbuhan produksi tertentu. Dengan demikian maka pertumbuhan ekonomi dapat diukur dengan pertumbuhan produksi nasional atau pendapatan nasional.

Teori Keynes menyatakan bahwa pertumbuhan pendapatan nasional ditentukan oleh besarnya pengeluaran konsumsi, pengeluaran pemerintah, investasi dan net ekspor. Jadi menurut Keynes untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang diukur pada peningkatan pendapatan nasional maka diperlukan peningkatan permintaan konsumsi, permintaan pengeluaran pemerintah, permintaan investasi, serta permintaan ekspor dan impor. Implementasi kedua konsep dan teori tersebut (klasik dan Keynesian) dapat digunakan untuk menghitung pertumbuhan ekonomi baik pada skala nasional maupun pada skala perekonomian makro daerah (propinsi, kabupaten/kota).

Konsep konsumsi yang merupakan konsep dari bahasa Inggris *Consumption*, yang berarti pembelaanjaan yang dilakukan untuk rumah tangga keatas barang-barang akhir dan jasa dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dari orang yang melakukan pembelaanjaan tersebut. Pembelaanjaan masyarakat atas makanan, pakaian dan barang-barang kebutuhan mereka

yang lainnya digolongkan atas pembelanjaan atau pengeluaran konsumsi. Barang-barang yang diproduksi khusus digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya dinamakan barang konsumsi (Sukirno, 2011:337).

Data pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia pada masa krisis 1998-2000 mengungkapkan bahwa terjadi penurunan tingkat investasi dalam negeri, dan tingkat ekspor yang rendah namun disisi lain tercapai pertumbuhan ekonomi sekalipun dalam tingkat pertumbuhan yang rendah.

Fakta tersebut juga mengungkapkan bahwa pertumbuhan perekonomian makro, tidak serta merta berimplikasi langsung pada kondisi ekonomi mikro. Hal ini dapat dijelaskan melalui perilaku konsumsi masyarakat. Kondisi perekonomian pada tahun 1997-2000 terjadi krisis, namun terdapat peningkatan pengeluaran masyarakat. Fakta lain adalah peningkatan pengeluaran pemerintah untuk peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dan pembangunan infrastruktur dasar telah menjadi pemicu peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah dan nasional. Hubungan ini dapat dilihat juga pada hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ram (1986), dan Grossman (1988), mengungkapkan bahwa terjadi hubungan positif antara peningkatan pengeluaran pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi dengan mengabaikan disagregasi pengeluaran tersebut.

Sementara itu perkembangan pengeluaran pemerintah juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tercatat dua jenis pengeluaran pada format lama APBD yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Kemudian pada tahun 2003, format APBD tersebut berubah dengan format baru dimana pos pengeluaran pembangunan menjadi belanja aparatur daerah yang meliputi belanja administrasi umum, belanja operasi dan

pemeliharaan, dan belanja modal dan pengeluaran rutin menjadi belanja pelayanan publik yang meliputi belanja administrasi umum, belanja administrasi dan pemeliharaan serta belanja modal.

Harrod-Domar menyatakan, untuk menjamin pertumbuhan ekonomi yang teguh, penanaman modal harus terus menerus mengalami penambahan dari tahun ketahun. Sekiranya keadaan ini tidak berlaku, pertumbuhan ekonomi akan mengalami perlambatan dan mungkin akan menghadapi resesi (Sukirno, 2011:451). Investasi menghimpun akumulasi modal dengan membangun sejumlah gedung dan peralatan yang berguna bagi kegiatan produktif, maka output potensial suatu bangsa akan bertambah dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang juga akan meningkat. Jelas dengan demikian demikian bahwa investasi dan konsumsi memainkan peranan penting dalam menentukan jumlah output dan pendapatan.

Pada skala perekonomian makro daerah, pertumbuhan ekonomi diukur melalui pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB). Berdasar pada pendekatan Keynes tersebut bahwa pertumbuhan pendapatan ditentukan oleh peningkatan permintaan pengeluaran faktor-faktor penentunya yaitu konsumsi, pengeluaran pemerintah, investasi dan ekspor dan impor. Hubungan antara pengeluaran konsumsi, pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi menjadi menarik untuk dikaji ketika hasil kajian Solow mengatakan bahwa investasi bukanlah satu-satunya kunci penentu pertumbuhan ekonomi.

Kondisi perekonomian Sulawesi Selatan secara menyeluruh masih menunjukkan perkembangan yang positif. Pertumbuhan perekonomian Sulawesi Selatan pada triwulan I tahun 2013 adalah sebesar 7,79 %

pertumbuhan ini lebih rendah bila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada triwulan I tahun 2012 yaitu sebesar 7,95% dan lebih tinggi bila dibandingkan secara nasional pada periode yang sama tahun 2013 yang baru mencapai 0,02%. Secara umum capaian kinerja tersebut didukung oleh pertumbuhan pada sektor pertanian pada angka sebesar 15,67% , sektor industri pengolahan sebesar 1,43%, sektor listrik gas dan air sebesar 0,78%, dan sektor perdagangan, hotel, restoran yang tumbuh 0,48%. Sedangkan sektor-sektor lainnya yang mengalami penurunan adalah sektor pertambangan dan penggalian (minus 11,31%), sektor konstruksi (4,43%), sektor jasa-jasa (minus 3,27%), sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan sebesar (1,12%) dan sektor pengangkutan dan komunikasi (minus 0,54%). Demikian pula pada tahun 2012 angka pertumbuhan mencapai 8,397% lebih tinggi daripada pertumbuhan tahun sebelumnya yaitu 7,61% dan pertumbuhan nasional yaitu 6,23%.

Berbagai faktor pendukung kinerja pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan tahun 2012 yaitu dari sisi permintaan yang tetap tumbuh tinggi, terutama didukung oleh kinerja investasi dan konsumsi. Sementara dari sisi penawaran tingginya kinerja perekonomian Sulawesi Selatan yaitu dari sektor pertanian dan sektor pertambangan yang tumbuh positif dan sektor industri, sektor konstruksi, sektor perdagangan dan sektor jasa-jasa tetap tumbuh hingga akhir tahun 2012. Demikian juga dengan inflasi pada triwulan I 2013 di Sulawesi Selatan cukup tinggi yaitu di kisaran 4,61% bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2012 yaitu 4,41% dan masih lebih rendah dibanding nasional 5,90%. Pengaruh cuaca dan kebijakan pembatasan impor hortikultura antara lain yang menjadi penyebab

naiknya harga kelompok bahan makanan disamping peningkatan harga properti dan bahan bangunan.

Selama triwulan 3 tahun 2017, perekonomian Sulawesi Selatan yang tercipta mencapai Rp 109,86 triliun atas dasar harga berlaku (ADHB) dan sebesar Rp 75,71 triliun berdasarkan atas dasar harga konstan (ADHK). Ekonomi Sulawesi Selatan pada triwulan 3-2017 tercatat tumbuh sebesar 6,25 persen bila dibandingkan triwulan 3-2016 (y on y) dan tumbuh 5,28 persen bila dibanding triwulan 2-2017 (q to q), serta tumbuh 6,78 persen secara kumulatif triwulan 1-3 2017. Ekonomi Sulsel triwulan II 2017 terhadap triwulan II 2016 tumbuh 6,63 persen, namun mengalami perlambatan jika dibanding periode yang sama tahun 2016," kata Kepala Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik Badan Pusat Statistik (BPS) Sulsel, Didik Nursetyohadi, saat rilis pertumbuhan ekonomi Sulsel Triwulan II, di kantor BPS Sulsel, Senin (7/8/2017). Berdasarkan data BPS, pertumbuhan ekonomi Sulsel pada triwulan I 2017 sebesar 7,52 persen, sementara pada triwulan II 2016 menembus 8,02 persen.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang pengaruh tingkat konsumsi rumah tangga dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi. Maka berdasarkan uraian diatas penulis tertarik mengangkat judul **“Pengaruh Konsumsi Rumah Tangga dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2012-2016”**.

B. Rumusan Masalah

Bedasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah konsumsi rumah tangga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan periode 2012-2016 ?
2. Apakah pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan periode 2012-2016 ?
3. Variabel manakah yang berpengaruh dominan terhadap pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan periode 2012-2016 ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh konsumsi rumah tangga terhadap pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan Periode 2012-2016.
2. Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan Periode 2002-2016.
3. Untuk mengetahui variabel yang berpengaruh dominan terhadap pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan periode 2012-2106.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Akademik

Bagi peneliti, untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Makassar.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bahan masukan kepada jajaran pemerintah di Kota Makassar.
- b. Memberikan Informasi berupa bahan bacaan atau bahan referensi bagi disiplin ilmu yang relevan.
- c. Dengan menganalisis pola konsumsi rumah tangga dapat diketahui besarnya kebutuhan konsumsi sehingga dapat di peroleh ramalan jumlah pajak yang terkait, saluran distribusi dan sektor sektor potensial sebagai sumber konsumsi pokok yang nantinya dapat bermanfaat dalam penyusunan anggaran belanja daerah, Sebagai bahan masukan dalam penyusunan kebijakan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. Konsumsi Rumah Tangga

Pengeluaran konsumsi rumah tangga adalah total nilai pasar dari barang dan jasa yang dibeli oleh rumah tangga selama satu tahun. Pengeluaran konsumsi rumah tangga terdiri atas dua komponen utama, yaitu (a) pengeluaran untuk non konsumsi atau barang tahan lama. Seperti mobil, alat elektronik, dan sebagainya. Sedangkan (b) pengeluaran untuk konsumsi barang dan jasa yang tidak tahan lama seperti makanan, sabun, pakaian, dan jasa lainnya. Berikut ini akan diuraikan teori konsumsi dari berbagai ahli ekonomi.

a. Teori Konsumsi Menurut Keynes

Teori konsumsi yang dikemukakan oleh JM. Keynes mengatakan bahwa besar kecilnya pengeluaran konsumsi hanya didasarkan atas besar kecilnya tingkat pendapatan masyarakat. Keynes menyatakan bahwa ada pengeluaran konsumsi minimum yang harus dilakukan oleh masyarakat (*konsumsi outonomous*) dan pengeluaran konsumsi akan meningkat dengan bertambahnya penghasilan.

Beberapa ciri fungsi konsumsi menurut Keynes yaitu, pertama penentu utama dari konsumsi adalah tingkat pendapatan. Kedua kecenderungan Mengkonsumsi Marginal (*Marginal Propensity to Consume*) – pertambahan konsumsi akibat kenaikan pendapatan sebesar satu satuan. besarnya MPC adalah antara nol dan satu. Dengan kata lain MPC adalah pertambahan atau perubahan konsumsi (ΔC) yang dilakukan masyarakat sebagai akibat pertambahan atau

perubahan pendapatan disposabel atau pendapatan yang siap dibelanjakan (ΔY). Ketiga, rasio konsumsi terhadap pendapatan, yang disebut dengan kecenderungan mengkonsumsi rata-rata (*Average Propensity to Consume*), turun ketika pendapatan naik, dengan demikian APC menurun dalam jangka panjang dan MPC lebih kecil dari pada APC ($MPC < APC$). Selain pendapatan, pengeluaran konsumsi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, seperti kekayaan, tingkat sosial ekonomi, selera, tingkat bunga dan lain-lain.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa fungsi konsumsi menggambarkan sifat hubungan diantara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dan pendapatan nasional atau pendapatan disposibel perekonomian tersebut. Dalam ciri-ciri fungsi konsumsi dinyatakan bahwa *APC* mengukur pendapatan disposable yang diinginkan oleh rumah tangga untuk dibelanjakan sebagai konsumsi. *MPC* mengukur setiap pertambahan pendapatan disposable yang diinginkan oleh rumah tangga untuk dibelanjakan sebagai konsumsi.

b. Teori Konsumsi dengan Hipotesis Siklus Hidup

Teori konsumsi dengan hipotesis ini dikemukakan oleh Ando, Brumberg, dan Modigliani yaitu tiga ekonom yang hidup di abad 18. Menurut teori ini faktor sosial ekonomi seseorang sangat mempengaruhi pola konsumsi orang tersebut. Teori ini membagi pola konsumsi menjadi tiga bagian berdasarkan umur. Yang pertama yaitu seseorang berumur nol hingga berusia tertentu dimana orang ini dapat menghasilkan pendapatan sendiri, maka ia mengalami *dissaving*

(mengonsumsi tapi tidak mendapatkan penghasilan sendiri yang lebih besar dari pengeluaran konsumsinya). Yang kedua yaitu mengalami persaingan, dan yang terakhir yaitu seseorang pada usia tua dimana ia tidak mampu lagi menghasilkan pendapatan sendiri dan mengalami dissaving lagi.

c. Teori Konsumsi dengan Hipotesis Pendapatan Relatif

Teori ini dikemukakan oleh James Duesenberry, yang menggunakan dua asumsi yaitu : a). selera sebuah rumah tangga atas barang konsumsi adalah interdependen. Artinya pengeluaran konsumsi rumah tangga dipengaruhi oleh pengeluaran yang dilakukan oleh orang disekitarnya (tetangga). Sedangkan b). Pengeluaran konsumsi adalah irreversible. Artinya pola pengeluaran seseorang pada saat penghasilan naik berbeda dengan pola pengeluaran pada saat penghasilan mengalami penurunan.

Duesenberry menyatakan bahwa teori konsumsi atas dasar penghasilan absolute sebagaimana yang dikemukakan oleh Keynes yang tidak mempertimbangkan aspek psikologi seseorang dalam berkonsumsi. Duesenberry menyatakan bahwa pengeluaran konsumsi rumah tangga sangat dipengaruhi oleh posisi atau kedudukan di masyarakat sekitarnya.

d. Teori Konsumsi dengan Hipotesis Pendapatan Permanen

Teori konsumsi dengan hipotesis pendapatan permanen dikemukakan oleh M. Friedman. Teori ini mengatakan bahwa pendapatan masyarakat dapat digolongkan menjadi dua yaitu pendapatan permanen dan pendapatan sementara. Pendapatan

permanen merupakan pendapatan yang selalu diterima pada setiap periode tertentu dan dapat diperkirakan sebelumnya, misalnya pendapatan dari upah dan gaji. Sedangkan pendapatan sementara merupakan pendapatan yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya, nilainya dapat positif jika nasibnya baik dan dapat negatif jika bernasib buruk.

2. Hubungan antara Konsumsi dengan Pertumbuhan Ekonomi

Pengeluaran konsumsi rumah tangga merupakan nilai belanja yang dilakukan oleh rumah tangga untuk membeli berbagai jenis kebutuhannya dalam satu tahun tertentu. Pendapatan yang diterima oleh rumah tangga akan digunakan untuk membeli makanan, pakaian, biaya jasa pengangkutan, membayar pendidikan anak, membayar sewa rumah dan membeli kendaraan. Barang-barang tersebut dibeli rumah tangga untuk memenuhi kebutuhannya. (Sukirno, 2011 : 337).

Keputusan konsumsi rumah tangga dipengaruhi keseluruhan perilaku baik jangka panjang maupun jangka pendek. Keputusan konsumsi rumah tangga untuk jangka panjang adalah penting karena peranannya dalam pertumbuhan ekonomi. Sedangkan untuk analisa jangka pendek peranannya penting dalam menentukan permintaan agregat. Konsumsi adalah dua per tiga dari GDP.

Menurut Sukirno "Pengeluaran konsumsi yang dilakukan oleh rumah tangga dalam perekonomian tergantung pada pendapatan yang diterima oleh mereka. Semakin besar pendapatan maka semakin besar pula konsumsinya. (Sukirno, 2011 : 337).

Seperti yang telah dijelaskan bahwa semakin tinggi pendapatan maka semakin besar pula konsumsi yang dilakukan oleh rumah tangga, namun pertambahan konsumsi yang terjadi, lebih rendah dari pada pertambahan yang berlaku. Maka makin lama, kelebihan konsumsi rumah tangga yang wujud bila dibandingkan dengan pendapatan yang diterimanya akan menjadi bertambah. Kelebihan konsumsi ini merupakan tabungan masyarakat. Hubungan ini dapat dilukiskan dalam bentuk persamaan :

$$Y_d = C + S \dots\dots\dots(2.1)$$

dimana Y_d adalah pendapatan disposibel, C adalah Konsumsi dan S adalah tabungan.

Akan tetapi, pada tingkat pendapatan yang sangat rendah, bisa saja seluruh pendapatan untuk digunakan untuk konsumsi sehingga tabungan adalah nol. Bahkan terpaksa konsumsi dibiayai dari kekayaan atau pendapatan masa lalu. Kondisi ini disebut dissaving atau mengorek tabungan.

Perkembangan ekonomi yang terjadi mengakibatkan bertambahnya variabel yang dapat mempengaruhi pengeluaran konsumsi selain pendapatan, diantaranya yaitu tingkat bunga, kekayaan, dan barang tahan lama. Tingkat bunga ini penting pengaruhnya terhadap tabungan yang pada akhirnya akan mempengaruhi konsumsi. Konsumen mempunyai preferensi terhadap suatu barang sekarang dibandingkan dengan barang itu diperoleh pada masa yang akan datang. Agar konsumen bersedia menanggihkan pengeluaran konsumsinya, diperlukan balas jasa yang disebut bunga. Semakin tinggi tingkat bunga

maka semakin besar pula uang yang ditabung (berarti semakin kecil uang yang dibelanjakan untuk konsumsi). Sebaliknya, semakin rendah tingkat bunga, maka jumlah uang yang ditabung juga semakin rendah (berarti semakin besar uang yang digunakan untuk konsumsi).

Kekayaan perubahan tingkat harga akan menyebabkan seseorang yang memiliki kekayaan akan mengalami perubahan kekayaan tersebut. Jika tingkat harga naik, maka nilai kekayaan akan naik dan pada kondisi tersebut pemilik kekayaan akan merasa lebih kaya dan akibatnya akan meningkatkan pengeluaran konsumsinya. Sebaliknya, jika harga turun, nilai kekayaan akan turun dan pemilik kekayaan akan merasa nilai kekayaannya menurun. Akibatnya ia akan mengurangi pengeluaran konsumsinya.

Barang tahan lama adalah barang yang dapat dinikmati sampai pada masa yang akan datang (biasanya lebih dari satu tahun) seperti, alat atau perabotan elektronik, mobil, motor, telepon seluler, dan lainnya.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pendapatan mempunyai peranan penting dalam mempengaruhi pengeluaran konsumsi masyarakat, baik itu untuk konsumsi barang tidak tahan lama, barang tahan lama, dan jasa. Semakin tinggi konsumsi masyarakat, maka pertumbuhan ekonomi pun akan ikut meningkat.

3. Teori Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah berperan untuk mempertemukan permintaan masyarakat dengan penyediaan sarana dan prasarana yang tidak dapat dipenuhi oleh pihak swasta. Dikatakan pula bahwa pengeluaran pemerintah yang dinyatakan dalam belanja pembangunan

bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi dalam proyek yang mengacu pada pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, peningkatan kesejahteraan, dan program yang menyentuh langsung kawasan yang terbelakang.

Tidak dapat dipungkiri bahwa campur tangan pemerintah dalam perekonomian sangat membantu, terutama setelah terjadi krisis ekonomi tahun 1997. Pemerintah menetapkan kebijakan pokok mengenai arah perekonomian melalui perencanaan, kebijakan pemerintah dan pengaturan. Pemerintah harus melakukan pengeluaran untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan umum, dan pembangunan, (Sicat, G.P dan Arndt, H. W : 1991).

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa. Pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Teori mengenai pengeluaran pemerintah terdiri dari pendekatan teori makro (Basri dan Subri, 2003).

Adapun teori mengenai pengeluaran pemerintah (Mangkoesoebrota dalam Yuswar Zainul basri dan Mulyadi Subri, 2003) terdiri dari :

a. Hukum Wagner

Hukum wagner menyatakan bahwa berdasarkan pengalaman empiris dari negara –negara maju (USA, Jerman, Jepang), wagner mengemukakan bahwa dalam suatu perekonomian, apabila pendapatan perkapita meningkat secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat. Meski demikian, Wagner menyadari

bahwa dengan tumbuhnya perekonomian hubungan antara industri, hubungan industri dengan masyarakat dan sebagainya menjadi semakin rumit atau kompleks.

Kelemahan hukum wagner adalah hukum tersebut tidak didasarkan pada suatu teori mengenai pemilihan barang publik, tetapi Wagner mendasarkan pandangannya dengan teori organis mengenai pemerintah (*organic theory of state*) yang menganggap pemerintah sebagai individu yang bebas bertindak, terlepas dari anggota masyarakat lainnya.

b. Teori Peacock dan Wiserman

Teori Peacock dan Wiserman yang didasarkan pada suatu pandangan bahwa pemerintah senantiasa berusaha untuk memperbesar pengeluaran sedangkan masyarakat tidak suka membayar pajak yang semakin besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar tersebut. Namun masyarakat mempunyai suatu tingkat toleransi pajak yaitu suatu tingkat dimana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai kegiatan pemerintah sehingga mereka mempunyai suatu tingkat kesediaan masyarakat untuk membayar pajak.

Menurut teori Peacock dan Wiserman, perkembangan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak yang semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah. Meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Oleh sebab itu dalam keadaan normal, meningkatnya GDP

menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar.

Apabila keadaan normal tersebut terganggu, misalnya adanya perang maka pemerintah harus memperbesar pengeluarannya untuk membiayai perang. Karena itu pemerintah melakukan penerimaannya dengan cara menaikkan tarif pajak sehingga dana swasta untuk investasi dan konsumsi menjadi berkurang. Akan tetapi perang tidak hanya bisa dibiayai dengan pajak sehingga pemerintah juga harus meminjam dari negara lain. Setelah perang selesai, sebetulnya pemerintah dapat menurunkan kembali tarif pada tingkat sebelum adanya gangguan, tetapi hal tersebut tidak dilakukan karena pemerintah harus mengembalikan angsuran utang dan bunga pinjaman untuk membiayai perang, sehingga pengeluaran pemerintah setelah perang selesai meningkat tidak hanya karena GDP naik, tetapi juga karena pengembalian utang dan bunganya.

c. Teori Rostow dan Musgrave

Teori perkembangan peranan pemerintah yang dikemukakan oleh Rostow dan Musgrave adalah pandangan yang ditimbulkan dari pengamatan berdasarkan pembangunan ekonomi yang dialami oleh banyak negara, tetapi tidak didasarkan oleh suatu teori tertentu. Selain itu, tidak jelas apakah akan terjadi pertumbuhan ekonomi dalam tahap demi tahap atau akan terjadi dalam beberapa tahap secara simultan.

4. Jenis – Jenis Pengeluaran Pemerintah

Berdasarkan surat keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 pengeluaran daerah terdiri dari dua jenis yaitu pengeluaran belanja aparatur daerah dan belanja publik. Belanja aparatur daerah terdiri dari belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan dimana dalam belanja operasi ini terbagi lagi menjadi beberapa bagian yaitu belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja perjalanan dinas, belanja pemeliharaan, dan belanja modal. Sedangkan yang kedua yaitu pengeluaran belanja publik.

Sesuai dengan undang-undang no 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara, dengan format belanja yang baru, anggaran belanja terdiri dari :

- a) Belanja pegawai merupakan kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada aparatur Negara sebagai imbalan atas kinerja pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.
- b) Belanja modal merupakan belanja yang digunakan untuk pembelian barang dan jasa yang habis digunakan untuk memproduksi barang yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan. Belanja modal digunakan untuk kegiatan investasi pemerintah melalui penyediaan sarana dan prasarana pembangunan dalam bentuk tanah, peralatan, mesin, gedung, bangunan, serta belanja modal fisik lainnya.
- c) Pembayaran bunga utang, terdiri dari peminjaman multilateral, bilateral, fasilitas kredit ekspor, dan pinjaman lainnya.
- d) Subsidi dialokasikan sebagai upaya pemerintah untuk menjaga stabilitas harga, dan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu dan usaha kecil menengah untuk memenuhi sebagian

kebutuhannya, serta membantu BUMN melakukan tugas pelayanan umum.

- e) Belanja hibah merupakan transfer yang sifatnya tidak wajib kepada Negara atau organisasi.
- f) Bantuan sosial, berupa bentuk cadangan untuk penanggulangan bencana alam.
- g) Belanja lain-lain. Pemanfaatan belanja lain-lain adalah untuk menampung belanja pemerintah yang tidak dapat diklasifikasikan kedalam jenis-jenis belanja diatas.

5. Hubungan antara Pengeluaran Pemerintah dengan Pertumbuhan Ekonomi

Peranan pengeluaran pemerintah baik yang dibiayai melalui APBN maupun APBD khususnya pengeluaran untuk *human capital* dan infrastruktur fisik, dapat mempercepat pertumbuhan, tetapi pada sisi lain pembiayaan dari pengeluaran pemerintah tersebut dapat memperlambat pertumbuhan. Hal ini sangat tergantung pada sejauh mana produktifitas pengeluaran pemerintah tersebut dan distorsi pajak yang ditimbulkannya, yang mana dalam konteks ini pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi total output (PDRB) yakni melalui penyediaan infrastruktur, barang-barang publik dan insentif pemerintah terhadap dunia usaha seperti subsidi ekspor.

Menurut Suparmoko (1996 : 345), pengeluaran-pengeluaran pemerintah untuk jaminan sosial, pembayaran bunga dan bantuan pemerintah lainnya akan menambah pendapatan dan daya beli. Secara keseluruhan pengeluaran pemerintah ini akan memperluas pasaran

hasil-hasil perusahaan dari industri yang pada gilirannya akan memperbesar pendapatan. Dengan bertambahnya pendapatan yang diperoleh pemerintah, maka akan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Dari segi penerimaan, maka pungutan pajak oleh pemerintah akan mengurangi pendapatan para pengusaha yang sebetulnya dapat digunakan untuk konsumsi dan pembentukan modal atau akan mengurangi pendapatan konsumsi dan penerimaan akan hasil produksi.

Selanjutnya Suparmoko (1996 : 345) mengatakan pengaruh yang terjadi dengan adanya pengeluaran dan penerimaan pemerintah, ini tergantung pada hubungan perimbangan antara pengeluaran dengan pendapatan pemerintah itu sendiri. Jika anggaran surplus, artinya pendapatan dari pajak-pajak dengan pungutan-pungutan lain lebih besar dari pengeluarannya, maka pengaruh yang ditimbulkan terhadap kehidupan ekonomi bersifat kontraktif atas employment, produksi regional dan output. Sebaliknya bila anggaran itu ternyata defisit yakni pengeluaran atau pembelanjaan pemerintah melampaui pendapatannya timbullah efek ekspansif dalam perekonomian.

Berdasarkan teori diatas, maka dapat disimpulkan bahwa baik atau tidaknya hasil yang dapat dicapai oleh kebijakan pemerintah tergantung dari kualitas pemerintah itu sendiri. Apabila pemerintah tidak atau kurang efisien, maka akan terjadi pemborosan dalam penggunaan faktor-faktor produksi. Jika pemerintah terlalu berkuasa dan menjalankan fungsi-fungsi ekonomi di dalam perekonomian suatu negara maka peranan swasta akan menjadi semakin kecil, para individu dan juga badan-badan usaha tidak lagi dapat melatih dirinya dalam menciptakan berbagai inisiatif

secara efektif untuk mencapai keputusan yang rasional yang sangat berguna bagi pencapaian kepuasan atau keuntungan yang maksimal. Sebaliknya pemerintah terlalu sedikit tanggung jawabnya terhadap masyarakat, kegiatan swasta akan dapat merusak kehidupan masyarakat yaitu dapat menimbulkan adanya pembagian penghasilan yang tidak merata, timbulnya kegiatan-kegiatan monopoli, tidak ada usaha-usaha yang sangat penting untuk kepentingan umum yang diusahakan.

6. Teori Pertumbuhan Ekonomi

Dalam zaman ahli ekonomi klasik, seperti Adam Smith dalam buku karangannya yang berjudul *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth Nations*, menganalisis sebab berlakunya pertumbuhan ekonomi dan factor yang menentukan pertumbuhan ekonomi. Setelah Adam Smith, beberapa ahli ekonomi klasik lainnya seperti Ricardo, Malthus, Stuart Mill, juga membahas masalah perkembangan ekonomi .

Adapun Teori tentang pertumbuhan ekonomi yaitu sebagai berikut :

a. Teori Klasik

1) Adam Smith

Teori Adam Smith beranggapan bahwa pertumbuhan ekonomi sebenarnya bertumpu pada adanya penambahan penduduk. Dengan adanya penambahan penduduk maka akan terdapat penambahan output atau hasil. Teori Adam Smith ini tertuang dalam bukunya yang berjudul *An Inquiry Into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*.

2) David Ricardo

Ricardo berpendapat bahwa faktor pertumbuhan penduduk yang semakin besar sampai menjadi dua kali lipat pada suatu saat akan menyebabkan jumlah tenaga kerja melimpah. Kelebihan tenaga kerja akan mengakibatkan upah menjadi turun. Upah tersebut hanya dapat digunakan untuk membiayai taraf hidup minimum sehingga perekonomian akan mengalami kemandengan (*stationary state*). Teori David Ricardo ini dituangkan dalam bukunya yang berjudul *The Principles of Political and Taxation*.

b. Teori Neoklasik

1) Model Input-Output Leontief

Model ini merupakan gambaran menyeluruh tentang aliran dan hubungan antar industri. Perencanaan pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan secara konsisten karena dapat diketahui gambaran hubungan aliran input-output antar industri. Hubungan tersebut diukur dengan koefisien input-output dan dalam jangka pendek/menengah dianggap konstan tak berubah .

2) Model Pertumbuhan Lewis

Model ini merupakan model yang khusus menerangkan kasus Negara sedang berkembang yang mempunyai banyak penduduk. Tekanannya adalah pada perpindahan kelebihan penduduk disektor pertanian ke sektor modern kapitalis industri yang dibiayai dari surplus keuntungan.

3) Robert Solow

Robert Solow berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan rangkaian kegiatan yang bersumber pada manusia, akumulasi modal, pemakaian teknologi modern dan hasil atau output. Adapun pertumbuhan penduduk dapat berdampak positif dan dapat berdampak negatif. Oleh karenanya, menurut Robert Solow penambahan penduduk harus dimanfaatkan sebagai sumber daya yang positif.

4) Harrod Domar

Teori ini beranggapan bahwa modal harus dipakai secara efektif, karena pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh peranan pembentukan modal tersebut. Teori ini juga membahas tentang pendapatan nasional dan kesempatan kerja.

Pertumbuhan suatu sektor tergantung pada stok barang modal, tenaga kerja, tingkat keahlian tenaga kerja dan perubahan teknologi serta skala ekonomi yang pada gilirannya akan menentukan keunggulan komparatif suatu sektor.

c. Teori Pertumbuhan Ekonomi yang Lain

1) Teori Baru Pertumbuhan Ekonomi (Akhir 1980-an dan Awal 1990-an)

Teori ini mencoba memodifikasikan dan mengembangkan teori pertumbuhan tradisional sedemikian rupa sehingga ia dapat menjelaskan mengapa ada sebagian negara yang mampu berkembang begitu cepat sedangkan yang lain begitu sulit atau bahkan mengalami stagnasi (kemacetan). Teori baru ini juga bermaksud menjelaskan mengapa meskipun konsep-konsep

neoklasik seperti pasar bebas dan otonomi sektor swasta begitu gencar didengungkan, tetapi peranan pemerintah dalam keseluruhan proses pembangunan masih tetap sangat besar.

2) Teori Tahapan Linier

- a. Rostow (*Stages-of-growth-models of development*) Model-model pembangunan pertumbuhan bertahap. Menurut Rostow dalam proses pembangunannya suatu negara akan melalui beberapa tahapan yaitu tahap pertama adalah tahapan tradisional, dengan pendapatan per kapita yang rendah dan kegiatan ekonomi yang stagnan; tahapan transisional, di mana tahap prakondisi bagi pertumbuhan dipersiapkan; tahap selanjutnya yaitu tahapan lepas landas (ini merupakan permulaan bagi adanya proses pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan); tahapan awal menuju ke kematangan ekonomi ; serta tahapan produksi dan konsumsi massal yang bersifat industri (inilah tahapan pembangunan atau development stage).
- b. *Harrod-Domar growth model* (Model pertumbuhan Harrod-Domar). Sebuah persamaan yang menunjukkan hubungan fungsional secara ekonomis antara berbagai variabel pokok ekonomi. Pada intinya model ini menyatakan bahwa tingkat pertumbuhan GDP (g) secara langsung tergantung pada tingkat tabungan nasional (s) dan sebaliknya akan menentukan rasio modal-output (k), sehingga persamaannya adalah $g = s/k$. Persamaan tersebut mengambil nama dari dua

orang ekonom terkemuka, yakni Sir Roy Harrod dari Inggris dan E. V. Domar dari Amerika Serikat.

Adapun beberapa kritikan terhadap Model Pembangunan Bertahap yaitu :

- 1) Gagasan dasar tentang pembangunan yang terkandung dalam teori-teori pertumbuhan bertahap tersebut di atas tidak selalu berlaku.
- 2) Alasan utama tidak berlakunya teori tersebut bukan karena tabungan dan investasi tidak lagi merupakan syarat penting (*necessary condition*) bagi pemacuan pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi karena dalam kenyataannya telah terbukti bahwa pengadaan tabungan dan investasi itu saja belumlah syarat cukup (*sufficient condition*) untuk memacu pertumbuhan ekonomi.

c. *Necessary Condition* (Syarat Perlu)

Syarat yang diperlukan demi terjadinya suatu peristiwa meskipun mungkin jika syarat itu tidak disertai oleh yang lain, maka peristiwa tersebut bisa tidak terjadi. Sebagai contoh, pembentukan modal (*capital*) merupakan syarat perlu guna menunjang pertumbuhan ekonomi (sebelum pertumbuhan output terjadi, harus ada alatnya dahulu untuk menghasilkan output tersebut). Akan tetapi, agar pertumbuhan tersebut bisa berlangsung secara berkesinambungan, maka harus ada pula perubahan sosial, kelembagaan dan sikap yang bersifat menunjang.

d. *Sufficient Condition* (Syarat Cukup)

Suatu kondisi atau syarat yang harus dipenuhi guna memungkinkan sesuatu hal bisa terjadi. Sebagai contoh, menjadi mahasiswa dari sebuah universitas tertentu merupakan syarat cukup untuk menerima pinjaman dana dari Program Kredit Mahasiswa. Model pembangunan Rostow dan Harrod-Domar secara implisit ternyata mengasumsikan adanya sikap-sikap dan pengaturan yang sama di negara-negara terbelakang. Akan tetapi, asumsi itu tidak sesuai dengan kenyataan yang ada di negara-negara Dunia Ketiga. Negara-negara tersebut masih sangat kekurangan faktor-faktor komplementer yang paling penting seperti halnya kecakapan manajerial, tenaga kerja yang terlatih, kemampuan perencanaan dan pengelolaan berbagai proyek pembangunan, dsb .

Negara-negara Dunia Ketiga sekarang ini merupakan bagian integral dari suatu sistem internasional yang sedemikian rumit dan integratif, sehingga strategi-strategi pembangunan yang paling hebat dan terencana secara matang sekalipun dapat dimentahkan begitu saja oleh kekuatan-kekuatan asing yang keberadaan dan sepak-terjangnya sama sekali di luar kendali negara-negara yang bersangkutan.

Maka muncullah pendekatan yang lebih baru dan radikal yang mencoba mengkombinasikan faktor-faktor ekonomi dan institusional ke dalam suatu model sistem baru mengenai kemajuan dan keterbelakangan internasional.

e. Model Perubahan Struktural

Mekanisme yang memungkinkan negara-negara terbelakang untuk mentransformasikan struktur perekonomian dalam negeri mereka dari pola perekonomian pertanian subsisten tradisional ke perekonomian yang lebih modern, lebih berorientasi ke kehidupan perkotaan, dan lebih bervariasi, serta memiliki sektor industri manufaktur dan sektor jasa-jasa yang tangguh. Model perubahan struktural tersebut dalam analisisnya menggunakan perangkat-perangkat neoklasik berupa konsep-konsep harga dan alokasi sumber daya, serta metode-metode ekonometri untuk menjelaskan terjadinya proses transformasi. Aliran pendekatan perubahan struktural ini didukung oleh ekonom-ekonom yang sangat terkemuka seperti W. Arthur Lewis yang termasyur dengan model teoretisnya tentang *surplus tenaga kerja dua sector* dan *two sector surplus labor* dan Hollis B.Chenery yang sangat terkenal dengan analisis empirisnya tentang *pola-pola pembangunan* dan *patterns of development*.

Teori Pembangunan Lewis :

- a) Transformasi struktural (*structural transformation*)
- b) Model dua-sektor Lewis (*Lewis two-sector model*)

Teori pembangunan yang menyatakan bahwa jika surplus tenaga kerja (*surplus labor*) dari sektor pertanian tradisional bisa dialihkan ke sektor industri modern yang daya serap tenaga kerjanya semakin tinggi, maka hal itu akan mempromosikan

industrialisasi dan dengan sendirinya akan memacu adanya pembangunan secara berkesinambungan.

Salah satu cara untuk melihat kemajuan perekonomian dan perkembangan sektor adalah mencermati nilai pertumbuhan Produk Domesti Regional Bruto (PDRB). PDRB adalah merupakan nilai dari seluruh barang dan jasa yang diproduksi dalam satu tahun dalam suatu wilayah tertentu tanpa membedakan faktor- faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi itu (*BPS sulsel, 1995*).

Dalam hitungan PDRB , seluruh lapisan usaha dibagi menjadi 9 sektor, yaitu : sektor Pertanian, sektor Pertambangan dan penggalian, sektor Industri pengolahan, sektor Listrik, gas, dan air bersih, sektor Bangunan, sektor Perdagangan, hotel dan restoran, sektor Angkutan dan komunikasi, sektor Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, dan sektor jasa- jasa.

Pembangunan semua sektor ditempuh berdasarkan rencana pembangunan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang yang tujuan fungsionalnya menyajikan prioritas pembangunan, mengidentifikasi sasaran pada masing- masing sektor, pengalokasian dana sesuai pada penekanan pada sektor tertentu, penentuan biaya, serta menentukan tolak ukur keberhasilan dan pelaksanaan.

7. Produk Domestik Regional Bruto

Untuk dapat mengukur sejauh mana pembangunan maupun sasaran serta target pembangunan yang ingin dicapai, maka diperlukan berbagai

alat analisis salah satu diantaranya adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Berdasarkan konsep dari BPS dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan PDRB adalah nilai yang ditimbulkan oleh aktifitas faktor-faktor produksi dalam merubah/memproses bahan-bahan baku/penolong sehingga lebih dekat pada pengguna atau nilai yang ditimbulkan oleh faktor-faktor produksi dalam wilayah tertentu dan dalam jangka waktu tertentu.

Nilai-nilai dari PDRB tersebut dapat dihitung dengan melalui tiga pendekatan yaitu: Segi produksi, PDRB merupakan jumlah netto atas suatu barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi dalam suatu wilayah dan biasanya dalam jangka waktu tertentu (satu tahun). Segi pendapatan, PDRB merupakan jumlah balas jasa (pendapatan) yang diterima faktor-faktor produksi karena ikut serta dalam proses produksi dalam suatu wilayah (satu tahun). Dan Segi pengeluaran, PDRB merupakan jumlah pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga, pemerintah dan lembaga swasta non profit serta ekspor netto (setelah dikurangi impor), dan biasanya dalam jangka waktu tertentu (satu tahun).

Dari segi penyajiannya, PDRB selalu dibedakan kepada dua pendekatan yaitu, PDRB atas harga berlaku dan PDRB atas harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku merupakan jumlah nilai produksi, pendapatan atau pengeluaran yang dinilai sesuai dengan harga berlaku pada tahun yang bersangkutan, sedangkan PDRB atas harga konstan merupakan jumlah nilai produksi, pendapatan atau pengeluaran yang dinilai sesuai dengan harga pasar yang tetap pada tahun dasar dan dalam publikasi ditetapkan tahun dasar adalah tahun 1993.

Nilai PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi karena nilai PDRB atas dasar harga konstan ini tidak dipengaruhi oleh perubahan harga, sedangkan PDRB atas dasar harga berlaku digunakan untuk melihat besarnya perekonomian suatu daerah.

Selanjutnya dapat dijelaskan pula bahwa dalam penyusunan PDRB akan diperoleh beberapa manfaat. Yang pertama Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan setiap sektor, Untuk mengetahui struktur perekonomian suatu daerah, Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan harga (inflasi/deflasi), dan Sebagai suatu indikator mengenai tingkat kemakmuran.

B. Tinjauan Empiris

Penelitian mengenai konsumsi rumah tangga dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia telah banyak dilakukan, antara lain sebagai berikut :

1. Rafiq (2016) menulis Pengaruh Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Investasi dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Tahun 2001:T1-2010:T4. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bukti empiris tentang pengaruh pengeluaran konsumsi rumah tangga, investasi dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2001:T1-2010:T4. Data yang digunakan adalah data skunder yang tersusun berdasarkan kurun waktu dari tahun 2001:T1 sampai dengan tahun 2010:T4. Alat analisis yang digunakan adalah model koreksi kesalahan atau *Error Correction Model* (ECM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsumsi rumah tangga berpengaruh positif dan signifikan, PMDN berpengaruh positif dan

signifikan, PMA berpengaruh positif dan signifikan, pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan dan secara bersama-sama konsumsi rumah tangga, PMDN, PMA dan pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2001:T1-2010:T4.

2. Ernita (2013) menuliskan Analisis Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, dan Konsumsi di Indonesia. Hasil penelitiannya adalah Model pada persamaan pertumbuhan ekonomi dalam penelitian ini terbukti diterima. Dengan demikian konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan net ekspor secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sementara itu, secara parsial konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan net ekspor berpengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Artinya, apabila terjadi peningkatan terhadap konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan net ekspor maka pertumbuhan juga akan mengalami peningkatan. Sebaliknya jika terjadi penurunan terhadap konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan net ekspor maka pertumbuhan ekonomi di Indonesia juga akan mengalami penurunan.
3. Chalid (2010) menulis tentang Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga di Daerah Riau. Hasil dari penelitian ini adalah pengeluaran konsumsi rumah tangga masyarakat Riau menunjukkan peranan yang besar dalam penggunaan PDRB. Pada tahun 2000 perannya 84,11% dari total PDRB tanpa migas dan 27,14% dari total PDRB dengan Migas. Pada tahun 2008 perannya turun menjadi 51,71% dari total PDRB

tanpa migas dan 27,90% dari total PDRB dengan migas atas dasar harga berlaku. Atas dasar harga konstan peranannya 71,77% dari total PDRB tanpa migas dan 33,56% dari total PDRB dengan migas. Berdasarkan data PDRB menurut penggunaan tahun 2000-2008 secara agregat proporsi pengeluaran konsumsi makanan berkisar antara 33,60% - 39,86% dan proporsi pengeluaran konsumsi bukan makanan berkisar 65,55% - 66,40%. Hal ini menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat Riau relatif baik.

4. Ma'ruf (2008) menulis tentang Pertumbuhan Ekonomi Indonesia : Determinan dan Prospeknya. Kesimpulan yang di peroleh dari penelitian ini adalah variabel PDRB tahun sebelumnya memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa kecepatan konvergen yang tinggi akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran pemerintah memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, demikian pula variabel openness, sumber daya alam, lokasi, dan variabel desentralisasi memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian ini masih bersifat agregat dan belum menganalisa hubungan kepada variable tersebut secara lebih rinci. Namun hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan bahan masukan bagi pengambil kebijakan dalam merancang pengeluaran pemerintah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Diharapkan ada studi lebih jauh yaitu analisis peran kebijakan fiskal dalam pertumbuhan ekonomi yang memisahkan antara kebijakan fiskal untuk kepentingan produktif seperti investasi publik dan kepentingan yang tidak produktif seperti konsumsi.

5. Zulkifli (2015) menulis tentang Analisis Konsumsi Rumah Tangga Nelayan di Kelurahan Boneoge Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan terhadap konsumsi rumah tangga nelayan di Kelurahan Boneoge Kecamatan Banawa maka digunakan analisis regresi linear sederhana. Regresi linear sederhana adalah merupakan salah satu alat analisis statistik parametrik yang digunakan untuk menganalisis dan mengukur seberapa jauh keterkaitan antara satu variabel independen (bebas) terhadap variabel dependen (terikat) dan membutuhkan data yang terdiri dari beberapa kelompok hasil observasi atau pengukuran. Data tersebut dapat diperoleh dari suatu observasi atau pengukuran pada berbagai bidang kegiatan. Hasil dari penelitian ini adalah Proporsi pengeluaran konsumsi terhadap pendapatan rumah tangga nelayan di Kelurahan Boneoge Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala sebagian besar dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan manakan (pangan) keluarga.

C. Kerangka Pikir

Untuk menyusun Kerangka pemikiran dalam penelitian ini, maka diaajukan asumsi-asumsi sebagai berikut :

Menurut Sukirno, Keputusan konsumsi rumah tangga (X_1) dipengaruhi keseluruhan perilaku baik jangka panjang maupun jangka pendek. Keputusan konsumsi rumah tangga (X_1) untuk jangka panjang adalah penting karena peranannya dalam pertumbuhan ekonomi (Y). Sedangkan untuk analisa jangka pendek peranannya penting dalam menentukan permintaan agregat. Lebih jauh Keynes menguraikan bahwa tingginya partisipasi masyarakat dalam mengonsumsi (X_1) akan meningkatkan output yang

akhirnya akan menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan tingkat pembangunan ekonomi. Sedangkan pengeluaran pemerintah juga ikut berperan penting terhadap pertumbuhan ekonomi, Secara rinci Dumairy menjelaskan Konsumsi rumah tangga (X1) , adalah dua per tiga dari GDP Pengeluaran konsumsi rumah tangga (X1) yang dilakukan oleh rumah tangga dalam perekonomian tergantung pada pendapatan yang diterima oleh mereka. Semakin besar pendapatan maka semakin besar pula konsumsinya.

Berdasarkan asumsi tersebut maka konsumsi rumah tangga (X1) merupakan fungsi dari pertumbuhan ekonomi yang secara matematis dapat di tuliskan:

$$X1 = f\{Y\}.....(1)$$

Keterangan :

X1 : Konsumsi Rumah Tangga

Y : Pertumbuhan Ekonomi (PDRB)

Menurut Suparmoko pengeluaran–pengeluaran pemerintah (X2) untuk jaminan sosial, pembayaran bunga dan bantuan pemerintah lainnya akan menambah pendapatan dan daya beli. Secara keseluruhan pengeluaran pemerintah ini akan memperluas pasaran hasil–hasil perusahaan dari industri yang pada gilirannya akan memperbesar pendapatan. Dengan bertambahnya pendapatan yang diperoleh pemerintah, maka akan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan asumsi tersebut maka pengeluaran pemerintah (X2) merupakan fungsi dari pertumbuhan ekonomi yang secara matematis dapat di tuliskan:

$$X_2 = f\{Y\} \dots \dots \dots (2)$$

Keterangan :

X_2 : pengeluaran pemerintah

Y : Pertumbuhan Ekonomi (PDRB)

Persamaan (1) dan (2) merupakan hubungan parsial antara variabel konsumsi rumah tangga (X_1) dan pengeluaran pemerintah (X_2) terhadap pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan, bila kedua persamaan tersebut disubstitusi maka akan diperoleh hubungan secara parsial antara ketiga variabel tersebut yaitu :

$$Y = f\{X_1, X_2\} \dots \dots \dots (3)$$

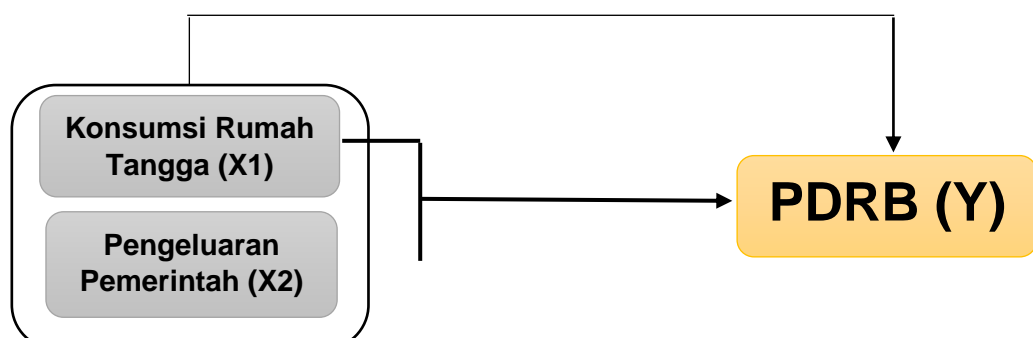
Keterangan :

Y : Pertumbuhan Ekonomi

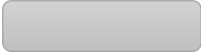

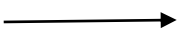
X_1 : Konsumsi Rumah Tangga

X_2 : Pengeluaran Pemerintah

Persamaan hubungan antar variabel yang ditunjukkan oleh persamaan (1),(2) dan (3) dapat digambarkan dalam bagan kerangka pikir sebagai berikut:



Keterangan :

-  : Variabel Independen
-  : Variabel Dependen
-  : Arah Hubungan

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

D. Hipotesis

1. Diduga bahwa terdapat pengaruh konsumsi rumah tangga terhadap pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan Periode 2012-2016.
2. Diduga bahwa terdapat pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan Periode 2012-2016.
3. Diduga bahwa konsumsi rumah tangga berpengaruh dominan terhadap pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan periode 2012-2016.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif, yaitu metode penelitian adalah pendekatan ilmiah terhadap keputusan ekonomi. Pendekatan metode ini berangkat dari data lalu diproses menjadi informasi yang berharga bagi pengambilan keputusan. Metode ini juga harus menggunakan alat bantu kuantitatif berupa dalam mengolah data tersebut.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian pada Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan yang beralamatkan di Jl. H. Bau No.18, Losari, Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90113. Adapun target waktu untuk melakukan penelitian ini yaitu pada bulan april sampai bulan mei 2018.

C. Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran

1. Pengeluaran konsumsi rumah tangga (X_1) adalah total nilai pasar dari barang dan jasa yang dibeli oleh rumah tangga selama satu tahun. Pengeluaran konsumsi rumah tangga terdiri atas dua komponen utama, yaitu (a) pengeluaran untuk non konsumsi atau barang tahan lama, seperti mobil, alat elektronik, dan sebagainya. Sedangkan (b) pengeluaran untuk konsumsi barang dan jasa yang tidak tahan lama seperti makanan, sabun, pakaian, dan jasa lainnya.
2. Pengeluaran pemerintah (X_2), merupakan pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan suatu kebijakan yang didapat dari anggaran penda³⁷ lanja daerah untuk meningkatkan laju perekonomian tahun 2012-2016 yang diukur dengan satuan rupiah. Peningkatan pengeluaran pemerintah yang besar belum tentu berakibat

baik terhadap aktivitas perekonomian. Untuk itu perlu dilihat efisiensi penggunaan pengeluaran pemerintah tersebut. Mengukur efisiensi pengeluaran pemerintah dapat dilihat dari proporsi pengeluaran rutin dan pembangunan juga dapat dilihat dari komposisi pengeluarannya. Dengan demikian efisiensi tidak dapat dilihat melalui satu indikator tertentu melainkan beberapa indikator secara bersama-sama.

3. Pertumbuhan ekonomi (Y) adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian di suatu daerah.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara sesuai dengan jenis data yang dibutuhkan. Dengan demikian, dalam penelitian ini penulis menggunakan dua cara yaitu:

1. Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.
2. Analisis dokumen adalah lebih mengarah pada bukti konkret. Dengan instrument ini, kita diajak untuk menganalisis isi dari dokumen-dokumen yang dapat mendukung penelitian kita.

Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari instansi-instansi terkait seperti Badan Pusat Statistik, Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Perpustakaan Pusat Universitas Muhammadiyah Makassar, maupun *Browsing* (pencarian) di internet dan beberapa sumber referensi yang menyangkut masalah teori-teori yang digunakan dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

E. Teknik Analisis

Dalam penelitian ini menggunakan teknik metode analisis regresi berganda atas tiga variabel bebas dan bertujuan untuk memudahkan penelitian dalam menginterpretasikan data yang akan diolah sehingga memudahkan untuk memahami kaitan antara variabel secara parsial ataupun simultan. Sebagai alat pengolahan data dengan menggunakan program SPSS.

Model analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh antar variabel bebas dan variabel terikat yaitu variabel regresi linear berganda, hal ini dapat dilihat pada Tingkat Konsumsi Rumah Tangga (X1), Tingkat Pengeluaran (X2), terhadap PDRB Per Kapita (Y). Selain itu juga untuk mengetahui sejauh mana besarnya pengaruh antar variabel bebas dan variabel independen, sehingga rumus yang digunakan adalah:

$$\mu Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan:

Y = PDRB Per Kapita

β_0 = Konstanta

X1 = Konsumsi Rumah Tangga

X2 = Pengeluaran Pemerintah

β = Parameter variabel terkait

e = error

Dalam penelitian ini dilakukan melalui pendekatan analisis kuantitatif yaitu dengan model analisis linier berganda. Untuk mengetahui pengaruh variabel independen dan variabel dependen maka dilakukan penelitian terhadap hipotesis pada penelitian ini. Untuk menilai apakah model regresi yang dihasilkan merupakan model yang paling sesuai, dibutuhkan beberapa pengujian dan analisis diantaranya adalah uji asumsi klasik yang mencakup uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji autokorelasi. Serta analisis regresi berganda yang mencakup koefisien Determinasi (R^2), uji T, uji F.

1. Uji Asumsi Klasik

Untuk mengetahui apakah model regresi estimasi baik atau tidak dan memberikan hasil yang akurat serta efisien dalam pendugaan, pengujian, dan peramalan maka model regresi tersebut perlu terlebih dahulu diuji asumsi klasik.

1) Uji normalitas

Uji normalitas merupakan salah satu bagian dari uji persyaratan analisis data atau uji asumsi klasik, artinya sebelum melakukan analisis yang sesungguhnya, data penelitian tersebut harus di uji kenormalan distribusinya. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah data penelitian yang dilakukan memiliki distribusi yang normal atau tidak. Adapun dasar pengambilan keputusan memenuhi normalitas atau tidak, adalah sebagai berikut:

- a. Jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05 maka data tersebut berdistribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- b. Jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 maka data tersebut tidak berdistribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

2) Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya kolerasi antar variabel bebas (independent). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi kolerasi diantara variabel bebas (tidak terjadi multikolinieritas). Jika variabel bebas saling berkoleraji, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal adalah variabel bebas yang nilai korelasi antar sesama variabel bebas sama dengan nol.

Dasar pengambilan keputusan keputusan pada uji Multikolinieritas dapat dilakukan dengan melihat nilai Tolerance dan VIF (*Variance Inflation Factor*). Melihat nilai tolerance yaitu:

- a. Jika nilai Tolerance lebih besar dari 0,10 maka artinya tidak terjadi Multikolinieritas terhadap data yang di uji.
- b. Jika nilai Tolerance lebih kecil dari 0,10 maka artinya terjadi Multikolinieritas terhadap data yang di uji.

Melihat nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) adalah :

- a. Jika nilai VIF lebih kecil dari 10,00 maka artinya tidak terjadi Multikolinieritas terhadap data yang di uji.
- b. Jika nilai VIF lebih besar dari 10,00 maka artinya terjadi Multikolinieritas terhadap data yang di uji.

3) Uji Heteroskedastisitas

Tujuan dari pengujian ini adalah untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain.

2. Analisis regresi berganda

1) Uji t Statistik

Uji-t digunakan untuk menunjukkan apakah masing-masing variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Pengujian ini dapat dilakukan dengan membandingkan hasil dari t hitung dan t tabel atau dapat juga dilakukan dengan membandingkan probabilitasnya pada derajat keyakinan tertentu.

Jika nilai sig < 0,05, atau t hitung > nilai t tabel maka H₀ ditolak atau menerima H_a artinya variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen secara signifikan. Sedangkan, jika nilai sig > 0,05, atau t hitung < nilai t tabel maka H₀ gagal ditolak artinya variabel individu tidak berpengaruh terhadap variabel dependen secara signifikan.

Bila dengan membandingkan probabilitasnya pada derajat keyakinannya 5% maka bila probabilitas < 0,05, berarti variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen secara signifikan. Sebaliknya, bila probabilitas lebih dari 0,05 maka variabel independen tidak berpengaruh secara signifikan. Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah hipotesis yang digunakan melalui uji hipotesis satu sisi

a) Jika hipotesis positif

$$H_0 : \beta_i \leq 0$$

$$H_a : \beta_i > 0$$

b) Jika uji hipotesis negatif

$$H_0 : \beta_i \geq 0$$

$$H_a : \beta_i < 0$$

Jika $T\text{-tabel} \geq t\text{-hitung}$ maka H_0 diterima berarti variabel independen secara individual tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen sebaliknya, Jika $t\text{-tabel} < t\text{-hitung}$ maka H_0 ditolak berarti variabel independen secara individu berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

2) Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk mengetahui hubungan antar variabel independen, apakah variabel Tingkat Konsumsi Rumah Tangga (X_1), dan Tingkat Pengeluaran Pemerintah (X_2), benar-benar berpengaruh secara simultan (bersama-sama) terhadap variabel dependen Y (PDRB Per Kapita). Uji F dilakukan dengan membandingkan nilai F-hitung dan F-tabel. Untuk menghitung nilai F statistik dapat digunakan dengan rumus:

Mencari nilai F hitung dengan formulasi persamaan dan nilai F kritis dari tabel distribusi F. Nilai F kritis berdasarkan besarnya α dan df dimana besarnya ditentukan oleh numerator $(k-1)$ dan df untuk denominator $(n-k)$. Adapun dasar pengambilan keputusan dalam uji simultan (uji F) yaitu:

a. Jika $F\text{ hitung} < F\text{ tabel}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak yang artinya variabel independen secara bersama-sama tidak mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.

b. Jika $F\text{-hitung} > F\text{ tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi (negatif/positif) variabel dependen secara signifikan.

3) Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien R^2 digunakan untuk mengukur seberapa baik regresi sesuai dengan data yang aktualnya. Artinya semakin besar R^2 pengaruh model dalam menjelaskan variabel dependen. Nilai R^2 terletak antara 0 dan 1. Semakin mendekati angka satu maka semakin baik garis regresi dan sebaliknya jika mendekati angka 0 maka garis regresi kurang baik. Koefisien determinasi (R^2) berfungsi untuk mengetahui berapa persen pengaruh yang diberikan variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Badan Pusat Statistik

Badan Pusat Statistik adalah Lembaga Pemerintah Non-Kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Sebelumnya, BPS merupakan Biro Pusat Statistik, yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 1960 tentang Sensus dan UU Nomer 7 Tahun 1960 tentang Statistik. Sebagai pengganti kedua UU tersebut ditetapkan UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Berdasarkan UU ini yang ditindaklanjuti dengan peraturan perundangan dibawahnya, secara formal nama Biro Pusat Statistik diganti menjadi Badan Pusat Statistik.

Materi yang merupakan muatan baru dalam UU Nomor 16 Tahun 1997, antara lain :

- a) Jenis statistik berdasarkan tujuan pemanfaatannya terdiri atas statistik dasar yang sepenuhnya diselenggarakan oleh BPS, statistik sektoral yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah secara mandiri atau bersama dengan BPS, serta statistik khusus yang diselenggarakan oleh lembaga, organisasi, perorangan, dan atau unsur masyarakat lainnya secara mandiri atau bersama dengan BPS.
- b) Hasil statistik yang diselenggarakan oleh BPS diumumkan dalam Berita Resmi Statistik (BRS) secara teratur dan transparan agar masyarakat dengan mudah mengetahui dan atau mendapatkan data yang diperlukan.
- c) Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien.
- d) Dibentuknya Forum Masyarakat Statistik sebagai wadah untuk menampung aspirasi masyarakat statistik, yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada .

Berdasarkan undang-undang yang telah disebutkan di atas, peranan yang harus dijalankan oleh BPS adalah sebagai berikut :

- a) Menyediakan kebutuhan data bagi pemerintah dan masyarakat. Data ini didapatkan dari sensus atau survey yang dilakukan sendiri dan juga dari departemen atau lembaga pemerintahan lainnya sebagai data sekunder
- b) Membantu kegiatan statistik di departemen, lembaga pemerintah atau institusi lainnya, dalam membangun sistem perstatistikan nasional.
- c) Mengembangkan dan mempromosikan standar teknik dan metodologi statistik, dan menyediakan pelayanan pada bidang pendidikan dan pelatihan statistik.
- d) Membangun kerjasama dengan institusi internasional dan negara lain untuk kepentingan perkembangan statistik Indonesia.

2. Visi dan Misi

a) Visi

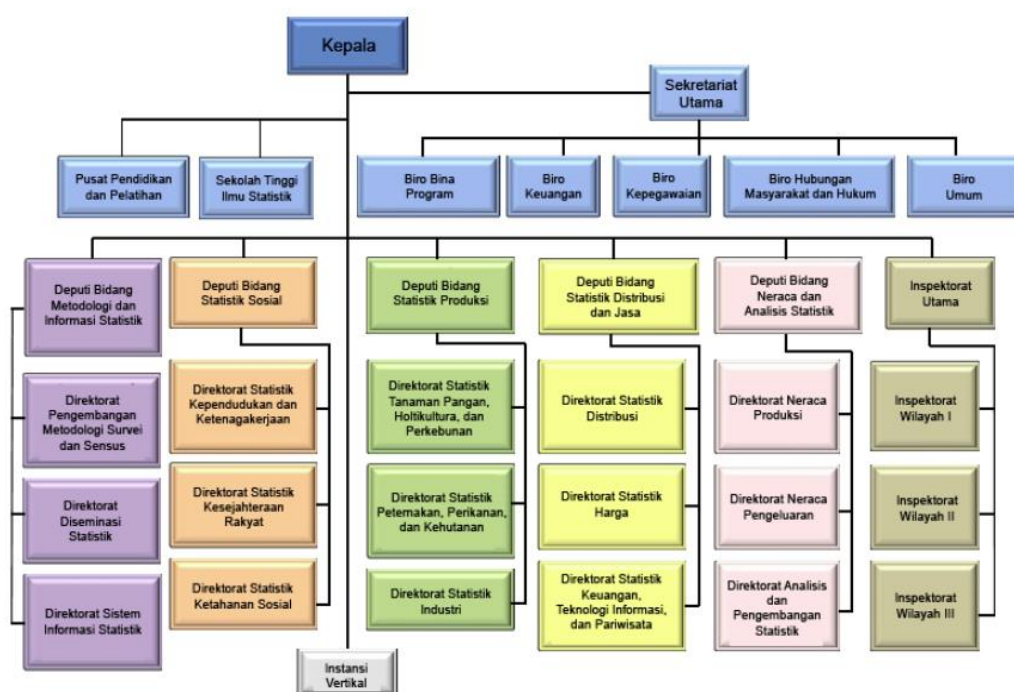
Pelopor data statistik terpercaya untuk semua

b) Misi

- 1) Memperkuat landasan konstitusional dan operasional lembaga statistik untuk penyelenggaraan statistik yang efektif dan efisien.
- 2) Menciptakan insan statistik yang kompeten dan profesional, didukung pemanfaatan teknologi informasi mutakhir untuk kemajuan perstatistikan Indonesia.
- 3) Meningkatkan penerapan standar klasifikasi, konsep dan definisi, pengukuran, dan kode etik statistik yang bersifat universal dalam setiap penyelenggaraan statistik.

- 4) Meningkatkan kualitas pelayanan informasi statistik bagi semua pihak.
- 5) Meningkatkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan statistik yang diselenggarakan pemerintah dan swasta, dalam kerangka Sistem Statistik Nasional (SSN) yang efektif dan efisien.

3. Struktur Organisasi BPS



Gambar 2.2 Struktur Organisasi BPS

B. Hasil Penelitian

1. Data Penelitian

- a. Konsumsi Rumah Tangga Provinsi Sulawesi Selatan

Konsumsi rumah tangga adalah total nilai pasar dari barang dan jasa yang dibeli oleh rumah tangga selama satu tahun. Pengeluaran konsumsi rumah tangga terdiri atas dua komponen utama, yaitu (a) pengeluaran untuk non konsumsi atau barang tahan lama. Seperti mobil, alat elektronik, dan sebagainya. Sedangkan (b) pengeluaran untuk konsumsi barang dan jasa yang tidak tahan lama seperti makanan, sabun, pakaian, dan jasa lainnya.

Dari data yang diperoleh mengenai tingkat konsumsi rumah tangga provinsi Sulawesi Selatan periode 2012-2016, dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.1
Konsumsi Rumah Tangga Provinsi Sulawesi Selatan

TAHUN	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga
2012	113.778.969,66
2013	120.561.213,72
2014	127.669.324,89
2015	134.421.200,87
2016	141.791.483,16

Sumber: Data Diolah 2018

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa Peningkatan pengeluaran konsumsi rumah tangga setiap tahunnya mengalami peningkatan, di tahun 2012 berada pada kisaran 113.778.969,66 juta rupiah, 2013 (120.561.213,72 juta rupiah) tiga tahun kemudian (2016) lebih meningkat lagi karena berada pada 141.791.483,16 juta rupiah. Hal diiringi dengan jumlah penduduk yang semakin bertambah tiap tahunnya, serta peningkatan konsumsi rumah tangga ini juga disebabkan oleh meningkatnya konsumsi pada hari-hari besar keagamaan atau tradisi yang dilakukan masyarakat tiap tahun. Selain jumlah penduduk yang

tiap tahunnya meningkat dan konsumsi hari-hari besar yang menjadi faktor pendorong meningkatnya konsumsi, pendapatan juga sangat berpengaruh terhadap peningkatan konsumsi.

b. Pengeluaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

Pengeluaran pemerintah berperan untuk mempertemukan permintaan masyarakat dengan penyediaan sarana dan prasarana yang tidak dapat dipenuhi oleh pihak swasta. Dikatakan pula bahwa pengeluaran pemerintah yang dinyatakan dalam belanja pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi dalam proyek yang mengacu pada pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, peningkatan kesejahteraan, dan program yang menyentuh langsung kawasan yang terbelakang.

Data yang diperoleh mengenai pengeluaran pemerintah provinsi Sulawesi Selatan periode 2012-2016, dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 4.2

Pengeluaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

TAHUN	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah
2012	22.451.028,70
2013	23.057.704,19
2014	23.505.017,43
2015	25.407.149,85
2016	25.066.372,25

Sumber: Data Diolah 2018

Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu aspek penggunaan sumber daya ekonomi yang secara langsung dikuasai oleh pemerintah dan secara tidak langsung dimiliki oleh masyarakat melalui pembayaran pajak. Realisasi Pengeluaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dapat

dilihat pada tabel di atas. Pengeluaran pemerintah pada 2012 sebesar 22.451.028,70 juta rupiah, tiga tahun kemudian (2016) mengalami peningkatan sebesar 25.066.372,25 juta rupiah. Peningkatan pengeluaran pemerintah terus terjadi disebabkan oleh pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah secara terus menerus pada tiap tahunnya.

c. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari besarnya nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan. Penggunaan atas dasar harga konstan ini dimaksudkan untuk menghindari pengaruh perubahan harga, sehingga perubahan yang diukur merupakan pertumbuhan riil ekonomi. Angka PDRB suatu daerah dapat memperlihatkan kemampuan daerah tersebut dalam mengolah sumber daya alam yang dimiliki melalui suatu proses produksi dengan menggunakan teknologi tertentu. Oleh karena itu, besar kecilnya PDRB suatu daerah sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor yang terdapat di daerah tersebut. Pada tabel dibawah ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan selama periode 2012-2016.

Tabel 4.3
PDRB Provinsi Sulawesi Selatan

TAHUN	P D R B	Pertumbuhan Ekonomi
2012	202.184.587,70	4,20
2013	217.589.132,10	7,61
2014	233.988.050,61	7,53

2015	250.758.284,22	7,16
2016	269.338.548,61	6,89

Sumber: Data Diolah 2018

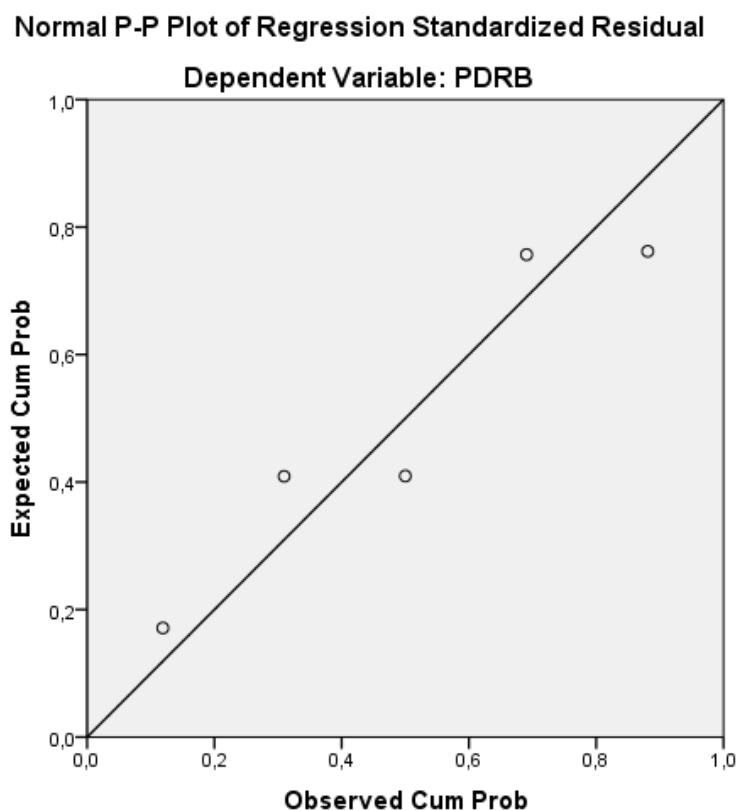
Berdasarkan tabel di atas kita dapat melihat bahwa persentase pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan periode 2012-2016, pada tahun 2012 pertumbuhan ekonomi menunjukkan angka 4,20% dan terjadi peningkatan positif pada tahun 2013 menunjukkan angka 7,61%, kemudian tiga tahun kemudian persentase pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan hingga menunjukkan angka 6,89% pada tahun 2016.

2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik bertujuan untuk memberikan kepastian bahwa regresi yang diperoleh memiliki ketepatan dalam estimasi, tidak bias dan konsisten. Adapun uji asumsi klsiak yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data penelitian berdistribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini, digunakan uji *Kolmogorov-Smimov*. Pengujian dilakukan dengan bantuan program SPSS. Uji normalitas dilakukan terhadap seluruh variabel penelitian, yang berarti ada 3 hasil uji normalitas, yaitu variabel PDRB Per Kapita (Y), Konsumsi Rumah Tangga (X1), Pengeluaran Pemerintah (X2). Berikut adalah output analisisnya.



Sumber: Data Diolah 2018

Gambar 2.3 Uji Normalitas Data

Sebagaimana terlihat dalam grafik Normal P-P plot of regression Standardized Residual , terlihat bahwa titik – titik menyebar disekitar garis diagonal , serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal (membentuk garis lurus), maka dapat dikatakan bahwa data berdistribusi normal dan model regresi layak dipakai untuk memprediksi pertumbuhan ekonomi berdasarkan variabel bebasnya.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas adalah uji untuk mengetahui apakah terdapat suatu hubungan linear antara masing-masing variabel independen di dalam model regresi. Multikolinearitas ini biasa terjadi ketika sebagian besar variabel yang digunakan saling terkait satu sama lain di dalam

model. Untuk mendeteksi adanya multikolinearitas dengan melihat nilai tolerance dan VIF (*Variance Inflation Factor*). Berikut adalah output dari uji Multikolinearitas:

Tabel 4.4
Uji Multikolinearitas

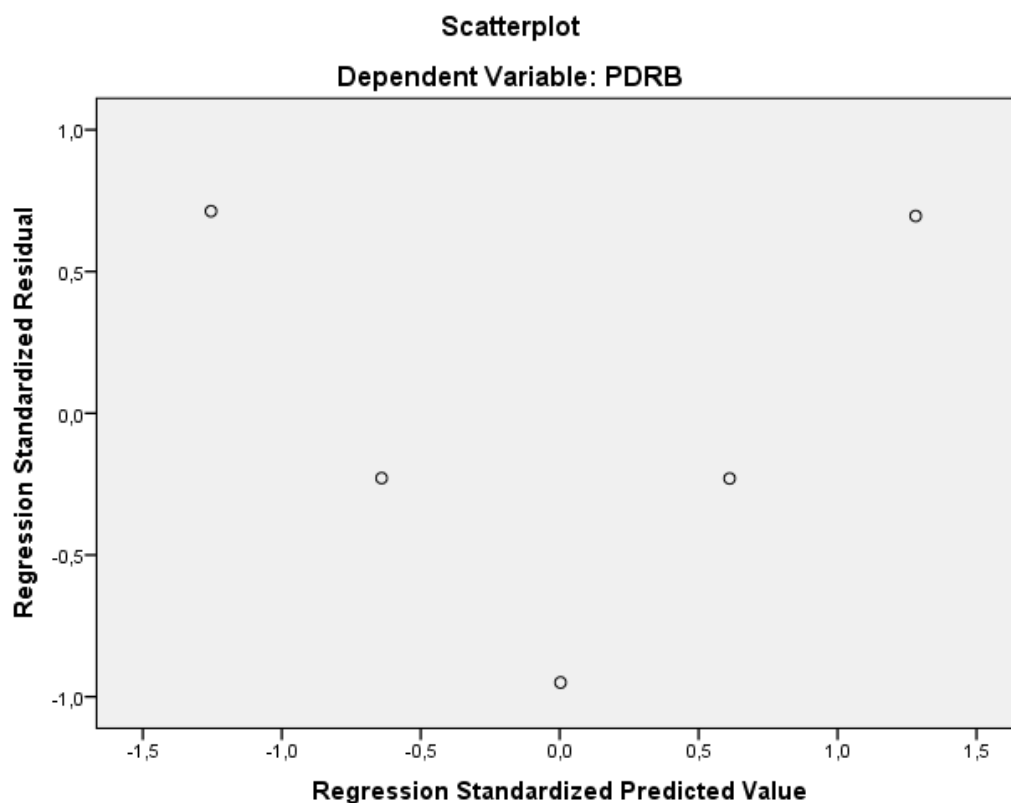
Variabel Bebas	Tolerance	VIF	Keputusan terhadap Asumsi Multikolinieritas
Konsumsi rumah tangga (X1)	0,136	7,345	Terpenuhi
Pengeluaran pemerintah (X2)	0,136	7,345	Terpenuhi

Sumber: Data Diolah 2018

Berdasarkan output pada tabel 4.5 dapat diketahui bahwa nilai Tolerance variabel Konsumsi Rumah Tangga (X1) sebesar 0,136 lebih besar dari 0,10, sementara variabel Pengeluaran Pemerintah (X2) yakni 0,136 lebih besar dari 0,10. Sementara itu, nilai VIF variabel Konsumsi Rumah Tangga (X1) yakni 7,345 lebih kecil dari 10,00, dan variabel Pengeluaran Pemerintah (X2) sebesar 7,345 lebih kecil dari 10,00. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi Multikolinieritas berdasarkan pada nilai tolerance dan VIF tersebut.

c. Uji Heteroskedastisitas

Tujuan dari pengujian ini adalah untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas, dan jika varians berbeda, disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi Heteroskedastisitas. Hasil pengujian ditunjukkan dalam tabel berikut :



Sumber: Data Diolah 2018

Gambar 2.4 Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan grafik Scatterplot tersebut, terlihat titik –titik menyebar secara acak dan tidak membentuk suatu pola tertentu yang jelas, serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini berarti tidak terjadi heretoskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi pertumbuhan ekonomi berdasar masukan variabel independent-nya.

3. Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi merupakan alat untuk meramalkan nilai peubah variabel bebas terhadap variabel terikat. Model pengaruh anatar variabel bebas dengan variabel terikat dalam penelitian ini, dapat disusun dalam fungsi atau persamaan sebagai berikut:

Tabel 4.5
Analisis Regresi Berganda

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-70575686,889	11083124,885		-6,368	,024
Konsumsi Rumah Tangga	2,403	,112	1,002	21,469	,002
Pengeluaran Pemerintah	-,060	,963	-,003	-,063	,956

a. Dependent Variable: PDRB

Sumber: Data Diolah 2018

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2$$

$$Y = -70575686,889 + 2,403 X_1 + -0,060 X_2$$

Keterangan:

Y = PDRB Per Kapita

X1 = Konsumsi Rumah Tangga

X2 = Pengeluaran Pemerintah

Persamaan regresi linear berganda tersebut menunjukkan bahwa nilai konstanta sebesar -70575686,889, yang berarti bahwa jika variabel jumlah konsumsi rumah tangga, dan pengeluaran pemerintah sama dengan nol, maka besarnya pertumbuhan ekonomi adalah -70575686,889. Variable Tingkat konsumsi rumah tangga memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan. Selain itu, pada nilai koefisien Konsumsi Rumah Tangga sebesar 2,403 maka hubungannya jika terjadi perubahan

Konsumsi Rumah Tangga sebesar satu persen maka akan mengubah pertumbuhan ekonomi sebesar 2,403 persen. Selain itu, untuk variabel pengeluaran pemerintah di Sulawesi Selatan memiliki hubungan negatif dan tidak signifikan pada $\alpha=5\%$ sehingga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan.

4. Koefisien Diterminasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) berfungsi untuk mengetahui berapa persen pengaruh yang diberikan variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen. Nilai koefisien determinasi menunjukkan besarnya variasi yang dapat dijelaskan oleh persamaan regresi yang dihasilkan. Untuk mengetahui besarnya pengaruh antar variabel X_1 , X_2 , dan X_3 terhadap Y yang dikuadratkan (*R square*). Nilai *R square* pada output SPSS sebagai berikut :

Tabel 4.6
Output Koefisien Determinasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	1,000 ^a	,999	,999	912969,96955	1,391

a. Predictors: (Constant), Pengeluaran Pemerintah, Konsumsi Rumah Tangga

b. Dependent Variable: PDRB

Sumber: Data Diolah 2018

Berdasarkan tabel 4.8, besarnya R^2 (*R square*) yang diperoleh dari pengolahan data dengan menggunakan SPSS sebesar 0,999. Dengan demikian besarnya pengaruh antar variabel bebas dan variabel terikat adalah sebesar 99,9%. Sedangkan sisanya sebesar 0,1% dapat dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

5. Uji Parsial (Uji-t)

Uji-t digunakan untuk menunjukkan apakah masing-masing variabel independen yaitu konsumsi rumah tangga dan pengeluaran pemerintah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu PDRB Per Kapita (Y). tabel 4.8 menunjukkan hasil analisis koefisien regresi secara parsial sebagai berikut:

Tabel 4.7
Analisis Koefisien Regresi Secara Parsial

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
	1 (Constant)	-70575686,889	11083124,885		
Konsumsi Rumah Tangga	2,403	,112	1,002	21,469	,002
Pengeluaran Pemerintah	-,060	,963	-,003	-,063	,956

a. Dependent Variable: PDRB

Sumber: *Data Diolah 2018*

a) Diketahui nilai Sig. Untuk pengaruh X1 terhadap Y adalah sebesar 0,002 < 0,05 dan nilai t hitung 21,469 > t tabel 4,302, sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 diterima yang berarti terdapat pengaruh X1 terhadap Y. Konsumsi Rumah Tangga berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB Sulawesi Selatan.

b) Diketahui nilai Sig. Untuk pengaruh X2 terhadap Y adalah sebesar 0,956 > 0,05 dan nilai t hitung -0,063 < t tabel 4,302, sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 diterima yang berarti tidak terdapat pengaruh X2 terhadap Y. Pengeluaran Pemerintah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap PDRB Sulawesi Selatan.

6. Uji Simultan (Uji F)

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen (X) yang meliputi X1 (Konsumsi Rumah Tangga), dan X2 (Pengeluaran Pemerintah),

secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Y) yaitu PDRB Per Kapita. Pada tabel 4.5 menunjukkan hasil dari regresi secara simultan sebagai berikut

Tabel 4.8
Hasil Uji Simultan (Uji F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	28065455035744	2	14032727517872	1683,562	,001 ^b
		36,000		18,000		
	Residual	1667028330614,4	2	833514165307,20		
		07		4		
	Total	28082125319050	4			
		50,500				

a. Dependent Variable: PDRB

b. Predictors: (Constant), Pengeluaran Pemerintah, Konsumsi Rumah Tangga

Berdasarkan output di atas diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y adalah sebesar $0,001 < 0,5$ dan nilai F hitung $1.683,562 > F$ tabel $9,55$, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak berpengaruh secara simultan variabel independent (X1 dan X2) terhadap variabel dependent (Y).

C. Pembahasan

Berdasarkan rumusan masalah maka dalam penelitian ini akan dibahas dua hal pokok yaitu pengaruh secara parsial dan simultan Konsumsi Rumah Tangga Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan tahun 2012-2016, sebagai berikut:

1. Pengaruh Konsumsi Rumah Tangga Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan Periode 2012-2016. Konsumsi Rumah Tangga berpengaruh positif dan signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ini terlihat dari hasil analisis regresi yang dilakukan dimana koefisien menunjukkan nilai t-hitung lebih besar dari t-tabel yaitu $21,469 > t \text{ tabel } 4,302$ dengan nilai probabilitas 0.002 di bawah 0,05 atau 5%. Berdasarkan tingkat konsumsi masyarakat tiap tahun mengalami peningkatan yang signifikan dengan demikian, peningkatan konsumsi rumah tangga itu sangat mempengaruhi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Hasil penelitian sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rafiq (2016), Ernita (2013), dan Chalid (2010), dimana ditemukan bahwa pengeluaran konsumsi rumah tangga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
2. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan 2012-2016. Pengeluaran Pemerintah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ini terlihat dari hasil regresi yang dilakukan dimana koefisien menunjukkan nilai t hitung lebih kecil dari t tabel yaitu $-0,063 < t \text{ tabel } 4,302$ dengan nilai probabilitas 0,956 di atas 0,05 atau 5%. Berdasarkan tingkat pengeluaran pemerintah yang tiap tahun mengalami peningkatan dengan demikian, peningkatan yang terjadi itu tidak berpengaruh terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Hasil penelitian tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rafiq (2016), dan Masruf (2008), dimana ditemukan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan analisis data

time series dengan menggunakan data yang terbatas hanya 5 tahun (2012-2016), maka dengan regresi berganda, maka besar kemungkinan hasil regresinya tidak maksimal.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil analisis konsumsi rumah tangga terhadap PDRB Per Kapita di Sulawesi Selatan selama periode 2012 hingga 2016 menunjukkan nilai t-hitung lebih besar dari t-tabel yaitu $21,469 > t$ tabel $4,302$ dengan nilai probabilitas $0,002$ di bawah $0,05$ atau 5% artinya variabel konsumsi rumah tangga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan.
2. Berdasarkan hasil analisis pengeluaran pemerintah terhadap PDRB Per Kapita di Sulawesi Selatan periode 2012 hingga menunjukkan nilai t hitung lebih kecil dari t tabel yaitu $-0,063 < t$ tabel $4,302$ dengan nilai probabilitas $0,956$ di atas $0,05$ atau 5% artinya variabel pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan.
3. Variabel yang berpengaruh dominan terhadap pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan adalah konsumsi rumah tangga. Hal ini terlihat dari nilai Beta sebesar $1,002$ lebih besar dibandingkan dengan nilai Beta variabel pengeluaran pemerintah sebesar $-0,003$

B. Saran

Diharapkan bagi Peneliti selanjutnya melakukan penelitian dengan melibatkan variable-variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini sehingga dapat memperkaya khasanah ilmu dan pengetahuan terutama dalam kajian ilmu ekonomi yang menyoroti tentang pertumbuhan ekonomi. Dan bagi pihak pemangku kebijakan diharapkan dapat

menyusun strategi yang mampu menyokong pertumbuhan ekonomi khususnya pemerintah daerah Sulawesi Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik : *Sulawesi Selatan Dalam Angka, Edisi 2012 - 2016*.

Basri, Zainal dan Yusman Subri Mulyadi. 2003. *Keuangan Negara dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri*. Jakarta : PT. Raja Grafindo.

- Easterly, William. 2002. *The Elusive quest For growth: Economists' Adventures and Misadventures in the Tropics*, MIT Press.
- Djokohadikusumo, S. 1996. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi, Dasar Teori Ekonomi, Pertumbuhan Dan Perkembangan Ekonomi*. Jakarta : LP3ES
- Grosman, P. 1998. *Government and Economic growth : A Non Linear Relationship*. Public Choice.
- Jhingan, L. M. 2012. *Ekonomi Pembangunan Perencanaan*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 Tentang *Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*, Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan, Makassar.
- Palupi, Sri. 2002. "Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi Kasus Di Kabupaten Purworejo)". Tesis-S2. Yogyakarta : MEP UGM.
- Pujiani, Andi. 2009. *Pengaruh Konsumsi Rumah Tangga, Investasi dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan (1997-2007)* , Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Samuelson, Paul dan William Nordhaus, 2003, *Makro Ekonomi*, edisi 17. Jakarta : Erlangga.
- Soamole, Ema Firawati. 2005. *Pengaruh Pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga, Dan Pertumbuhan pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia tahun 1983-2003*. Skripsi. Jurusan Ilmu Ekonomi. Makassar.
- Subri, Mulyadi. 2003. *Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Pembangunan*. Jakarta. Rajawali Pers.
- Sukirno, Sadono 2011: *Pengantar Teori Mikroekonomi*, Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada
- Suparmoko, M. 1996. *Keuangan Negara* Yogyakarta. Badan Penerbit F

L
A

M P I R A N

```
REGRESSION
  /DESCRIPTIVES MEAN STDDEV CORR SIG N
  /MISSING LISTWISE
  /STATISTICS COEFF OUTS BCOV R ANOVA COLLIN TOL CHANGE ZPP
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)
  /NOORIGIN
  /DEPENDENT Y
  /METHOD=ENTER X1 X2
  /SCATTERPLOT=(*ZRESID ,*ZPRED)
  /RESIDUALS DURBIN HISTOGRAM(ZRESID) NORMPROB(ZRESID)
  /CASEWISE PLOT(ZRESID) ALL.
```

Regression

Notes

Output Created		06-JUN-2018 11:53:59
Comments		
Input	Active Dataset	DataSet0
	Filter	<none>
	Weight	<none>
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	5
Missing Value Handling	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.
	Cases Used	Statistics are based on cases with no missing values for any variable used.
Syntax		<pre> REGRESSION /DESCRIPTIVES MEAN STDDEV CORR SIG N /MISSING LISTWISE /STATISTICS COEFF OUTS BCOV R ANOVA COLLIN TOL CHANGE ZPP /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) /NOORIGIN /DEPENDENT Y /METHOD=ENTER X1 X2 /SCATTERPLOT=(*ZRESID ,*ZPRED) /RESIDUALS DURBIN HISTOGRAM(ZRESID) NORMPROB(ZRESID) /CASEWISE PLOT(ZRESID) ALL. </pre>
Resources	Processor Time	00:00:03,06
	Elapsed Time	00:00:03,53
	Memory Required	1644 bytes
	Additional Memory Required for Residual Plots	904 bytes

[DataSet0]

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
PDRB	234771720,6480	26496285,26749	5
Konsumsi Rumah Tangga	127644438,4600	11050874,39528	5
Pengeluaran Pemerintah	23897454,4840	1284219,97610	5

Correlations

		PDRB	Konsumsi Rumah Tangga	Pengeluaran Pemerintah
Pearson Correlation	PDRB	1,000	1,000	,929
	Konsumsi Rumah Tangga	1,000	1,000	,929
	Pengeluaran Pemerintah	,929	,929	1,000
Sig. (1-tailed)	PDRB	.	,000	,011
	Konsumsi Rumah Tangga	,000	.	,011
	Pengeluaran Pemerintah	,011	,011	.
N	PDRB	5	5	5
	Konsumsi Rumah Tangga	5	5	5
	Pengeluaran Pemerintah	5	5	5

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Pengeluaran Pemerintah, Konsumsi Rumah Tangga ^b		Enter

a. Dependent Variable: PDRB

b. All requested variables entered.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	1,000 ^a	,999	,999	912969,96955	,999	1683,562	2	2	,001	1,391

a. Predictors: (Constant), Pengeluaran Pemerintah, Konsumsi Rumah Tangga

b. Dependent Variable: PDRB

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2806545503574436,000	2	1403272751787218,000	1683,562	,001 ^b
	Residual	1667028330614,407	2	833514165307,204		
	Total	2808212531905050,500	4			

a. Dependent Variable: PDRB

b. Predictors: (Constant), Pengeluaran Pemerintah, Konsumsi Rumah Tangga

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
		1	(Constant)	-70575686,889			11083124,885		-6,368	,024	
	Konsumsi Rumah Tangga	2,403	,112	1,002	21,469	,002	1,000	,998	,370	,136	7,345
	Pengeluaran Pemerintah	-,060	,963	-,003	-,063	,956	,929	-,044	-,001	,136	7,345

a. Dependent Variable: PDRB

Coefficient Correlations^a

Model		Pengeluaran Pemerintah	Konsumsi Rumah Tangga
1	Correlations	Pengeluaran Pemerintah	1,000
		Konsumsi Rumah Tangga	-,929
	Covariances	Pengeluaran Pemerintah	,928
		Konsumsi Rumah Tangga	-,100

a. Dependent Variable: PDRB

Collinearity Diagnostics^a

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions		
				(Constant)	Konsumsi Rumah Tangga	Pengeluaran Pemerintah
1	1	2,997	1,000	,00	,00	,00
	2	,003	31,551	,25	,12	,00
	3	,000	120,225	,75	,88	1,00

a. Dependent Variable: PDRB

Casewise Diagnostics^a

Case Number	Std. Residual	PDRB	Predicted Value	Residual
1	,713	2,02E+8	201533783,6191	650804,08092
2	-,229	2,18E+8	217798085,0351	-208952,93506
3	-,950	2,34E+8	234855213,2314	-867162,62141
4	-,230	2,51E+8	250968360,7333	-210076,51331
5	,696	2,69E+8	268703160,6211	635387,98886

a. Dependent Variable: PDRB

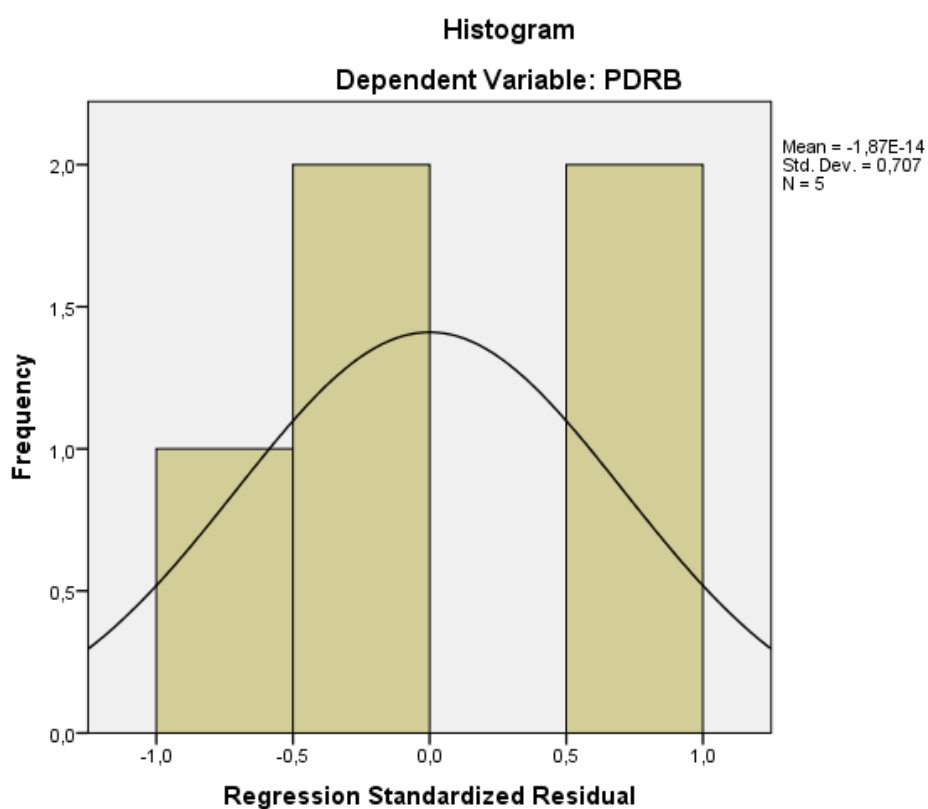
Residuals Statistics^a

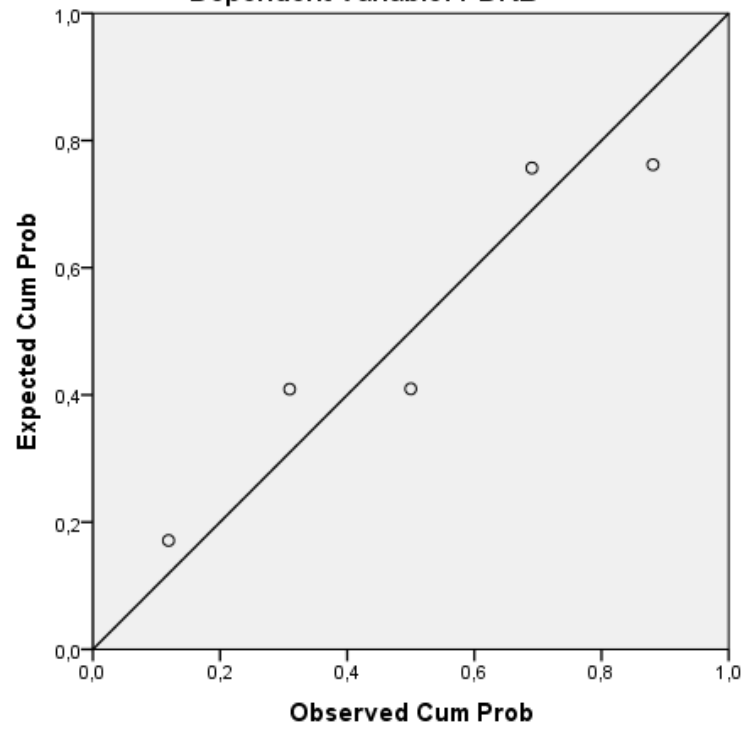
	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	201533776,0000	268703168,0000	234771720,6480	26488419,65640	5
Residual	-867162,62500	650804,06250	,00000	645567,25649	5

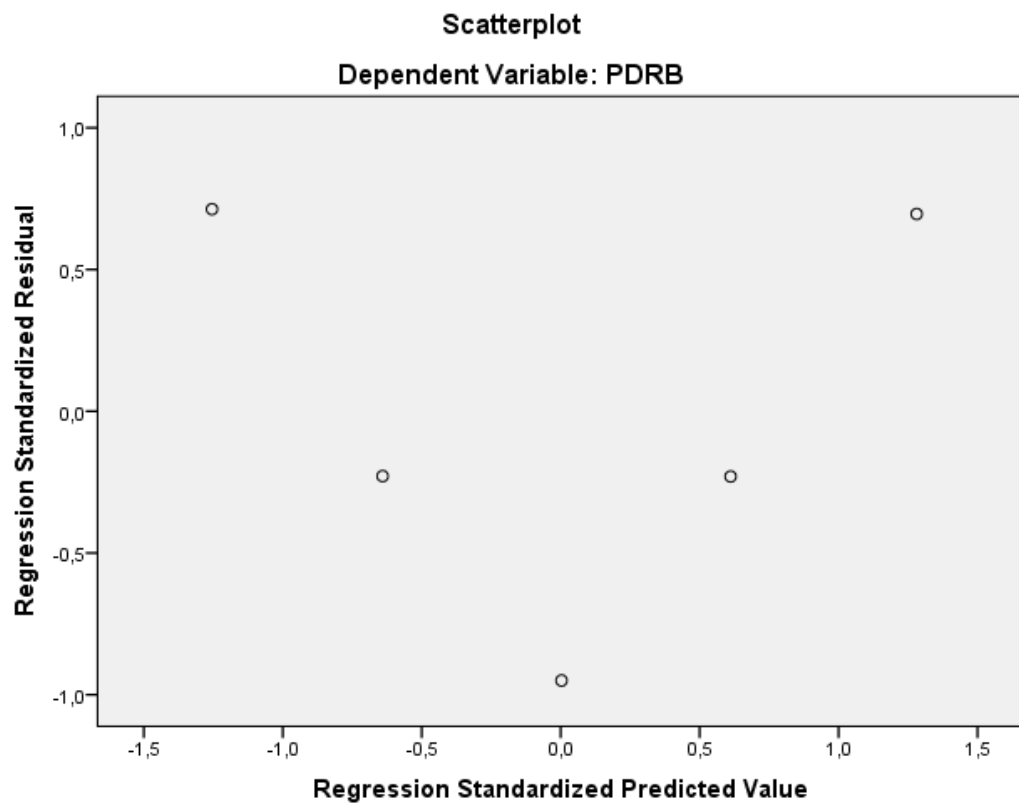
Std. Predicted Value	-1,255	1,281	,000	1,000	5
Std. Residual	-,950	,713	,000	,707	5

a. Dependent Variable: PDRB

Charts



Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual**Dependent Variable: PDRB**





BIOGRAFI PENULIS

Andi Hakib lahir di Balikpapan pada tanggal 29 september 1996. Anak pertama dari pasangan Ayahanda Mappiaman (Alm) dengan Andi Hasma. Penulis mulai memasuki jenjang pendidikan sekolah dasar di SD Negeri 129 Bontosuka Desa Singa Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba, tamat pada tahun 2008. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 2 Herlang dan tamat pada tahun 2011. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMK Negeri 1 Bulukumba dan tamat pada tahun 2014. Pada tahun yang sama penulis terdaftar sebagai mahasiswa jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar program Strata Satu dan akan menyelesaikan masa perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Makassar dengan judul skripsi “Pengaruh Konsumsi Rumah Tangga dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2012-2016”.